

Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Badan Mutu KKP Tarakan



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Badan Mutu KKP Tarakan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2025

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PPID TRIWULAN IV (OKTOBER – DESEMBER) TAHUN 2025

PENDAHULUAN

Latar Belakang Strategis

Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan IV Tahun 2025 ini disusun bukan sekadar sebagai pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mengukur derajat akuntabilitas dan transparansi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Mutu KKP Tarakan.

Mengacu pada hasil evaluasi Triwulan III yang menekankan pada inisiasi digitalisasi dan draf regulasi, periode penutup tahun ini difokuskan pada penguatan fondasi hukum dan stabilitas sistem. Narasi dalam laporan ini mendokumentasikan bagaimana seluruh rekomendasi periode sebelumnya telah diimplementasikan guna memastikan bahwa standar pelayanan informasi tetap terjaga di tengah dinamika kebutuhan publik yang semakin kompleks di penghujung tahun anggaran.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan evaluasi pada triwulan akhir ini memiliki maksud dan tujuan yang lebih spesifik, antara lain:

- **Pengukuhan Legalitas Pelayanan:** Melakukan finalisasi dan pengesahan instrumen hukum internal untuk memproteksi petugas informasi dan menjamin kepastian bagi pemohon informasi.
- **Validasi Efektivitas Sistem Digital:** Menguji ketangguhan platform digital "PELIKAN" dalam menangani beban kerja koordinasi lintas unit secara otomatis dan *real-time*.
- **Evaluasi Dampak dan Kepercayaan:** Mengukur korelasi antara kualitas respons yang diberikan dengan tingkat kepuasan serta kepercayaan publik melalui metode survei yang lebih terukur.

Landasan Operasional

Evaluasi ini berpijak pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disempurnakan serta target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis tahunan. Fokus utama penilaian diarahkan pada konsistensi performa yang sebelumnya telah menunjukkan tren positif, terutama dalam hal kecepatan durasi layanan dan ketepatan klasifikasi informasi.

2. RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI

Perluasan Ruang Lingkup

Monev Triwulan IV mencakup ruang lingkup analisis yang lebih luas dibandingkan periode sebelumnya, meliputi:

- **Audit Tata Kelola Digital:** Peninjauan terhadap integrasi penuh seluruh unit kerja pendukung data ke dalam satu ekosistem informasi yang terpusat.
- **Manajemen Risiko Informasi:** Evaluasi terhadap prosedur Uji Konsekuensi untuk memastikan bahwa pemberian informasi yang bersifat sensitif atau dikecualikan telah melalui pertimbangan hukum yang matang dan sah.

Metodologi Analisis

Laporan ini menggunakan metodologi gabungan antara analisis kuantitatif dan kualitatif. Data statistik diambil dari log aktivitas harian pelayanan informasi, sementara analisis kualitatif dilakukan melalui tinjauan dokumen dan observasi terhadap efektivitas koordinasi internal. Metodologi ini memastikan bahwa setiap simpulan yang diambil didukung oleh bukti data yang objektif dan valid.

3. HASIL DAN ANALISIS KINERJA MENDALAM

Stabilitas Kecepatan dan Kualitas Layanan Publik

Berdasarkan pencatatan selama bulan Oktober hingga Desember 2025, PPID Badan Mutu KKP Tarakan berhasil menunjukkan performa yang sangat stabil.

- **Narasi Deskriptif:** Meskipun terjadi peningkatan volume permohonan informasi menjelang akhir tahun, rata-rata waktu respons berhasil dipertahankan secara konsisten di bawah 4 hari kerja.
- **Analisis:** Keberhasilan ini merupakan dampak langsung dari pemahaman staf yang semakin matang terhadap alur kerja digital, yang memungkinkan proses verifikasi informasi dilakukan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.

Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Tahun 2025 Melalui Platform Digital "PELIKAN"

Transformasi digital yang diinisiasi pada triwulan sebelumnya kini telah mencapai tahap operasional paripurna di seluruh lini organisasi.

- **Narasi Deskriptif:** Platform "PELIKAN" telah menggantikan seluruh prosedur Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP yang sebelumnya dilaksanakan secara manual. Sistem ini memungkinkan sinkronisasi data antar unit teknis dilakukan secara otomatis.
- **Analisis Strategis:** Integrasi ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga menjamin integritas dan validitas data yang disajikan kepada publik, karena setiap data yang keluar telah melalui verifikasi berjenjang dalam sistem.

Formalisasi Legalitas melalui SOP Uji Konsekuensi

Langkah paling signifikan pada periode ini adalah penguatan aspek legalitas yang sebelumnya menjadi perhatian pada Triwulan III.

- **Narasi Deskriptif:** Draf SOP Uji Konsekuensi yang sebelumnya masih dalam tahap pengujian, kini telah disahkan menjadi dokumen hukum formal melalui Keputusan pimpinan.
- **Dampak:** Dengan adanya pengesahan ini, tim PPID memiliki payung hukum yang kuat dalam menetapkan klasifikasi informasi (terbuka atau dikecualikan), sehingga risiko sengketa informasi dapat dimitigasi secara preventif.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TAHUN 2026

Kesimpulan Penutup Tahun

Secara keseluruhan, kinerja PPID Badan Mutu KKP Tarakan selama tahun 2025 ditutup dengan capaian yang sangat memuaskan. Transformasi dari tata kelola manual menuju digital telah berhasil memberikan efisiensi nyata. Badan Mutu KKP Tarakan meraih Piagam Perhargaan sebagai Unit kerja berpredikat INFORMATIF Tahun 2025. Penguatan legalitas melalui SOP Uji Konsekuensi dan pemanfaatan teknologi melalui platform "PELIKAN" telah memosisikan PPID sebagai unit layanan yang modern, transparan, dan akuntabel.

Rekomendasi Strategis untuk Tahun 2026

1. **Peningkatan Keamanan Siber:** Melakukan audit rutin terhadap infrastruktur digital untuk menjamin keamanan data pemohon informasi dalam platform "PELIKAN".
2. **Survei Kepuasan Berbasis Dampak:** Mengembangkan instrumen survei yang lebih dalam untuk melihat sejauh mana informasi yang diberikan memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi dan edukasi masyarakat.
3. **Pelatihan Berkelanjutan:** Mengagendakan pelatihan berkelanjutan bagi petugas informasi mengenai pembaruan regulasi keterbukaan informasi nasional guna mempertahankan standar kompetensi tim.

5. PENGESAHAN

Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2025 ini disusun sebagai dokumen resmi untuk digunakan sebagai rujukan pimpinan dalam menentukan arah kebijakan strategis pelayanan informasi di tahun anggaran berikutnya.

Tarakan, 31 Desember 2025

Disusun Oleh,
PPID Pelaksana



Eko Syahrudi, S.Pi
NIP. 19840914 200902 1 004

Mengetahui,

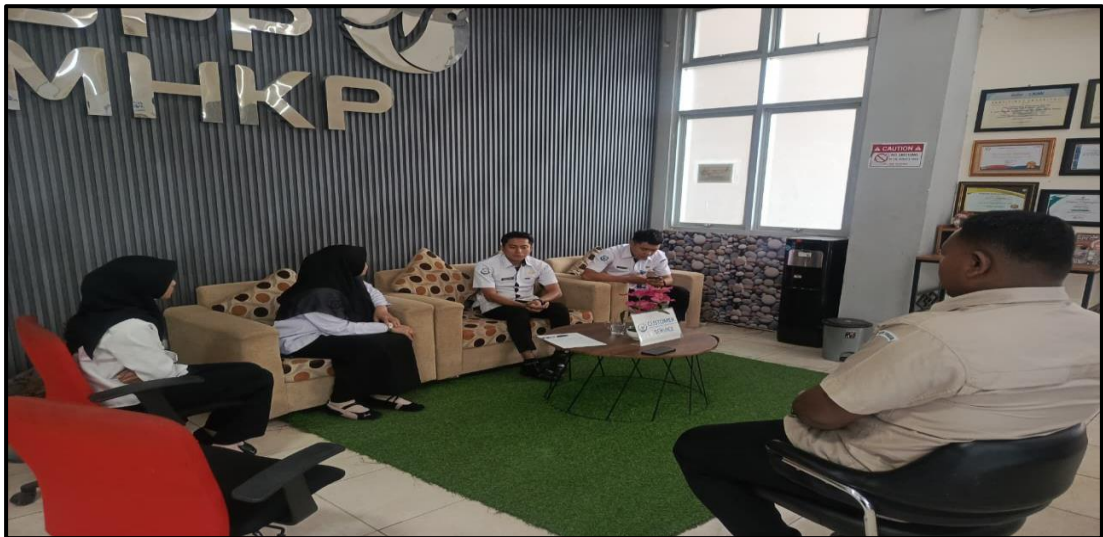
Pt. Kepala Badan Mutu KKP Tarakan



Winda Anggraeni, S.Pi

NIP. 197903012007012011

Lampiran





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 25/PPID-KKP/XII/2025

TENTANG

HASIL PENILAIAN EVALUASI MANDIRI
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa guna mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan rangkaian tahapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2025 terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana baik pada unit organisasi eselon I maupun unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa salah satu tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a yakni tahap evaluasi mandiri dilakukan melalui pengisian kuesioner, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolak ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG HASIL PENILAIAN EVALUASI MANDIRI MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, objektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.
- KEDUA : Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri dari dua kategori unit kerja yang telah diklasifikasikan berdasarkan tolok ukur yang dihasilkan dari tahapan pengisian kuesioner penilaian mandiri (*Self Assessment Questionnaire/SAQ*) pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 merupakan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tidak dapat diganggu gugat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2025

KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA LUAR NEGERI
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

ZAKI MUBAROK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 25/PPID-KKP/XII/2025
TENTANG HASIL PENILAIAN EVALUASI
MANDIRI MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2025

HASIL PENILAIAN EVALUASI MANDIRI
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

A. Informatif (Nilai 90 s.d. 100)

PPID Pelaksana Eselon I

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	100
2.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	100
3.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	100
4.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	100
5.	Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	100
6.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100
7.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	100
8.	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100
9.	Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	100

PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar	100
2.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang	100
3.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong	100
4.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang	100
5.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak	100
6.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar	100
7.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	100
8.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	100
9.	Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	100
10.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	100

11.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	100
12.	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara	100
13.	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	100
14.	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	100
15.	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	100
16.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi	100
17.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu	100
18.	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPP) Karawang	100
19.	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUK) Karangasem	100
20.	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang	100
21.	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Ambon	100
22.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa	100
23.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tual	100
24.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak	100
25.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi	100
26.	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang	100
27.	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRSDI) Jatiluhur	100
28.	Balai Riset Pemuliaan Ikan, Sukamandi	100
29.	Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP)	100
30.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Balikpapan	100
31.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Mataram	100
32.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Sorong	100
33.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ambon	100
34.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Aceh	100
35.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jakarta II	100
36.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Tarakan	100
37.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Ternate	100
38.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Padang	100
39.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Cirebon	100
40.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bandung	100
41.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan	100

	Hasil Perikanan (BKIPM) Banjarmasin	
42.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Batam	99,90
43.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan	99,90
44.	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	99,88
45.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	99,80
46.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	99,80
47.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Bogor	99,73
48.	Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee	99,70
49.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya I	99,70
50.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Merak	99,60
51.	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	99,50
52.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Cilacap	99,40
53.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat	99,38
54.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak	99,35
55.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal	99,35
56.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal	99,30
57.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Merauke	99,11
58.	Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok	99,05
59.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo	98,88
60.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jayapura	98,85
61.	Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Makassar	98,80
62.	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP)	98,55
63.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Luwuk Banggai	98,50
64.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Yogyakarta	98,50
65.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tahuna	98,50
66.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan	98,25
67.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta	97,85
68.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bima	97,80
69.	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	97,60
70.	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	97,52
71.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	97,32
72.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan	97,31
73.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bengkulu	97,30

74.	Balai Riset Perikanan Budaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Maros	97,10
75.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palangkaraya	96,93
76.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam	96,85
77.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan	96,83
78.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Jambi	96,78
79.	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	96,32
80.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	96,05
81.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pangkal Pinang	95,82
82.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Entikong	95,68
83.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bau - Bau	95,58
84.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung	95,45
85.	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	95,40
86.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Lampung	95,40
87.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang	95,10
88.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Medan II	94,80
89.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kupang	94,65
90.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon	94,63
91.	Loka Riset Perikanan Tuna, Benoa	94,18
92.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pontianak	94,10
93.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	93,35
94.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Mamuju	93,35
95.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Manado	93,13
96.	Balai Uji Standar KIPM	93,05
97.	Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	92,90
98.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung	92,80
99.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	92,65
100.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Gorontalo	92,60
101.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon	92,42
102.	Balai Riset Perikanan Laut, Jakarta	92,17
103.	Loka Riset Budidaya Rumput Laut, Boalemo Gorontalo	92,15
104.	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, Gondol Buleleng Singaraja	92,10
105.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kupang	91,60
106.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo	91,41
107.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana	91,35

B. Menuju Informatif (Nilai 80 s.d. 89,9)

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Politeknik Ahli Usaha Perikanan	89,81
2.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Semarang	89,80
3.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	89,02
4.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi	88,64
5.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Medan I	88,30
6.	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	86,57
7.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung	85,81
8.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	84,75
9.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya II	84,62
10.	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	84,21
11.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palu	83,65
12.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone	82,85
13.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai	82,70
14.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	82,36
15.	Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman	82,19
16.	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	82,17
17.	Balai Besar Penangkapan Ikan	81,98
18.	Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir Padang	80,11
19.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon	80,10

C. Cukup Informatif (Nilai 60 s.d. 79,9)

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Denpasar	79,80
2.	Akademi Komunitas Kelautan Perikanan Wakatobi	79,27
3.	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	79,02
4.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	76,10
5.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong Aceh	74,55
6.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	74,15
7.	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan, Wakatobi	72,70
8.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Tanjung Pinang	71,25
9.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pekanbaru	70,82
10.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman	70,19
11.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang	69,56
12.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong	69,18

13.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kendari	67,41
14.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jakarta I	67,35
15.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran	66,25
16.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Tanjung Balai Asahan	62,87
17.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Tahuna	62,10

D. Kurang Informatif (Nilai 40 s.d. 59)

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang	53,14
2.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	47,32

E. Tidak Informatif (Nilai < 39,9)

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang	0

KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA LUAR NEGERI
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,



Ditandatangani
Secara Elektronik

ZAKI MUBAROK



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.1272/MEN-KP/XII/2025

Penghargaan diberikan kepada:

BPPMHKP TARAKAN

sebagai unit organisasi berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Jakarta, 2 Desember 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono